

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**POLITEKNIK NEGERI MANADO – JURUSAN AKUNTANSI PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN**

**TAHUN 2015**

**Oleh:**

**Putri Riskitta Amalia**

**NIM: 11 042 017**

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN KONSEP *VALUE FOR MONEY* DI PEMERINTAH KOTA TERNATE**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**POLITEKNIK NEGERI MANADO – JURUSAN AKUNTANSI PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN**

**TAHUN 2015**

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN KONSEP *VALUE FOR MONEY* DI PEMERINTAH KOTA TERNATE**



**TUGAS AKHIR**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat**

**Dalam Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Sains Terapan**

**Pada Program Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan**

**Oleh:**

**Putri Riskitta Amalia**

**NIM: 11 042 017**



POLITEKNIK NEGERI MANADO

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN

**PERSETUJUAN**

Skripsi dengan Judul

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN KONSEP *VALUE FOR MONEY* DI PEMERINTAH KOTA TERNATE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oleh | | |
| Nama | : | Putri Riskitta Amalia |
| N I M | : | 11 042 017 |
| Program Studi | : | D4 Akuntansi Keuangan |
|  |  |  |
| Disetujui Untuk Diujikan | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Manado, 31 Agustus 2015 |
| Pembimbing 1 |  | Pembimbing 2 |
| Stevie Kaligis, SE., MM.Ak.CA  NIP. 19720415 200212 1 001 |  | Esrie A.N. Limpeleh, SE.,MM  NIP. 19710429 200501 1 001 |
| Mengetahui,  Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan | | |
| Jeffry Otniel Rengku, SE.,MM.Ak.CA  NIP.196309241994031001 | | |



POLITEKNIK NEGERI MANADO

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN

**PENGESAHAN**

Tugas Akhir dengan Judul

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN KONSEP *VALUE FOR MONEY* DI PEMERINTAH KOTA TERNATE**

telah dipertahankan di hadapan Sidang Tim Penguji Akhir

pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015, pukul :14.00 - 15.00 di Jurusan Akuntansi.

Oleh

Putri Riskitta Amalia

NIM: 027004001

dan yang bersangkutan dinyatakan

**LULUS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tim Penguji Akhir | | | |
| Ketua Sidang/ Penguji | : | Alpindos Toweula, SE.,MM.Ak .CA  NIP.196309241994031001 | ……………………….…. |
| Anggota | : | Siandwi Sagiman,SE,MM,Ak  NIP. 19620210 199303 1 002 | ………………………….. |
| Anggota | : | Barno Sungkowo, SE.,MM.Ak .CA  NIP. 19610818 199403 1 001 | ………………………….. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mengetahui, | | |
| Ketua  Jurusan Akuntansi, |  | Ketua Program Studi,  D4 Akuntansi Keuangan |
| Susy Amelia Marentek, SE.,MSA  NIP. 19631230 198903 2001 |  | Jeffry Otniel Rengku, SE.,MM,Ak CA  NIP.196309241994031001 |

**PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya buat adalah orisinil, merupakan hasil karya saya sendiri, tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi manapun, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam skripsi ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustakanya.

Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manado, Agustus 2015

Penulis,

**Putri Riskitta Amalia**

**NIM. 11 042 017**

**ABSTRAK**

Amalia, Riskitta, Putri. 2015. **Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Konsep *Value For Money* di Pemerintah Kota Ternate**. Tugas Akhir. Politeknik Negeri Manado. Dosen Pembimbing I : Stevie Kaligis SE, MM.Ak, Dosen Pembimbing II : Esrie A.N. Limpeleh, SE.MM.

Penelitian ini membahas tentang analisis kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan konsep *value for money* di pemerintah Kota Ternate, yang bertujuan untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kota Ternate yang mana hasil pengukuran dapat mendorong pemerintah meningkatkan kinerja keuangannya dengan menggunakan konsep *value for money*. Pengukuran kinerja Kota Ternate dilakukan melalui pendekatan konsep *value for money* yaitu 3E : Ekonomis, efisiensi, dan efektifitas.

Penelitian ini dilaksanakan di salah satu instansi Pemerintah Kota Ternate yakni DPPKAD Kota Ternate, berdasarkan laporan realisasi APBD Kota ternate selama lima tahun terakhir. Data kuantitatif yang dihasilkan dari penilaian 3E kemudian dianalisa dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dan observasi langsung dilapangan.

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa rata-rata kinerja keuangan pemerintah Kota Ternate memenuhi kriteria “Ekonomis” dilihat dari sisi ekonomisnya, kriteria “efektif” apabila diamati dari sisi efektivitasnya, dan kriteria “sangat efisien” bila dilihat dari sisi efisiennya. Sehingga disarankan agar pemerintah Kota Ternate untuk meningkatkan kinerja keuangannya agar dapat lebih efektif, demi tercapainya kualitas *value for money* dalam pengelolaan anggaran pemerintah Kota Ternate.

Kata kunci : Kinerja Keuangan, *Value For Money.*

**ABSTRACT**

Amalia, Riskitta. Putri. 2015. ***Analysis the financial performance of local Government with the concept of value for money in Ternate City Government****.* Paper, Accounting Department of Manado State Polytechnic. Guiding Teacher I : Stevie Kaligis SE, MM.Ak, Guiding Teacher II : Esrie A.N. Limpeleh, SE.MM.

This study aims to measure the financial performance of Ternate City Government, which of this measurement results can encourage the Government to improve this financial performance with the concept of value for money which known as 3E : economy, efficiency, and effectiveness.

This study was conducted one of the government in City of Ternate, that is DPKAD City of Ternate, of the report on the realization of Ternate City budget during the last 5 years. Quantitative data wich was generated from the 3E assessment has been analyzed with descriptive methods. Data collected by interview and observation.

The result of this study have showed that averange financial performance of Ternate City Government has met the criteria “economical” from economic side, criteria “effective” when viewed from effective and criteria “highly efficient” from efficient side. So it is worthwhile to Ternate City Government to improve its financial in order to more effective, for the achievement of quality value for money in the budget and financial management of the City of Ternate.

**Keywords** : *Financial Performance, Value For Money.*

**BIOGRAFI**

Nama : Putri Riskitta Amalia

Tempat Tanggal Lahir : Ternate, 19 Oktober 1993

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat Rumah : Jl. Baru, Kel. Kasturian, Kec. Ternate

Utara. Ternate, Maluku Utara

Riwayat Pendidikan :

* Sekolah Dasar : SD. Negeri Ngidi Ternate (1999-2005)
* Sekolah Menengah Pertama : SMP. Negeri 1 Ternate (2005-2008)
* Sekolah Menengah Atas : SMA. Negeri 1 Ternate (2008-2011)
* Perguruan Tinggi : Politeknik Negeri Manado (2011-2015)

MOTTO

***“Always be yourself, no matter what they say and never be anyone else even if the look better than you”***

***(mamapapabelaviko)***

**KATA PENGANTAR**

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Konsep *Value For Money* di Pemerintah Kota Ternate.**

Penelitian ini merupakan tugas yang harus diselesaikan sebagai syarat untuk memenuhi syarat-syarat untuk meraih gelar Sarjana Terapan Akuntansi. Dan atas izin-Nya, penulis telah menyelesaikan penelitian ini. Dalam realisasinya, penulis sadar sepenuhnya bahwa banyak pihak yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Oleh karena itu, puji dan syukur penulis haturkan atas kekuatan yang telah Tuhan anugerahkan.

Penyusunan tugas akhir ini tidak lepas dari dukungan beberapa pihak, karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Susy Marentek SE, MSA, selaku Ketua Jurusan Akuntansi
2. Bpk. Jeffry O. Rengku SE.MM.Ak, selaku Kepala Program Studi D4 Akuntansi Keuangan dan juga merupakan Dosen Wali.
3. Stevie kaligis, SE. MM. Ak selaku Dosen Pembimbing I
4. Esrie A.N. Limpeleh, SE. MM. selaku Dosen Pembimbing II
5. Dosen-dosen panitia Tugas Akhir, dosen pengajar selama 4 tahun perkuliahan sekaligus staf jurusan akuntansi
6. Ibu Nuraini Nawawi, MM selaku sekertaris di DPKAD dan sudah sangat membantu dalam informasi data-data selama penelitian
7. Keluarga yang selalu mendukung penulis terlebih khususnya buat Papa (Amril Nifu), Mama (Maryasam Nawawi), adik (Bela Amanda Syahvira), dan kakak (Muh. Taufik Amril) dan semua keluarga saya yang selalu mendoakan serta memberikan semangat dan menyiapkan setiap kebutuhan yang diperlukan penulis.
8. Linda J. Regar, Jane Bawuna, Markus Pantow dan Billy Hiskia Sigalingging yang merupakan sahabat terbaik yang selalu memberi motivasi dan semangat untuk penulis.
9. Teman-teman penulis, Akuntansi Keuangan angkatan 2011 yang selalu memberikan motivasi dan semangat.
10. Mas Bayu (staf DPKAD) dan semua yang sudah berpartisi dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini, masih terdapat berbagai kekeliruan, karena itu penulis mengaharapkan saran ataupun kritikan yang membangun, demi penyempurnaan laporan ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pemba dan semua yang membutuhkan.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Manado, Agustus 2015

**Putri Riskitta Amalia**

**Nim 11 042 017**

**DAFTAR ISI**

halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS iv

ABSTRAK v

ABSTRACT vi

BIOGRAFI vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI x

DAFTAR TABEL xii

DAFTAR GAMBAR xiii

DAFTAR LAMPIRAN xiv

**BAB I. PENDAHULUAN 1**

* 1. Latar Belakang Masalah 1
  2. Batasan Masalah 7
  3. Rumusan Masalah 7
  4. Tujuan Penelitian 7
  5. Manfaat Penelitian 7

**BAB II. LANDASAN TEORI 9**

* 1. Kinerja 9

1. Pengertian Kinerja 7
2. Peran Indikator Kinerja 11
3. Manfaat Indikator Kinerja 12
4. Penilian Kinerja 13
5. Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja 15
6. Konsep Value For Money 16
   1. Definisi Konseptional 25
   2. Fokus Penelitian 27
   3. Data yang diperlukan 27

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN 28**

* 1. Jenis Penelitian 28
  2. Tempat dan Waktu Penelitian 28
  3. Sumber Data 29
  4. Teknik Pengumpulan Data 29
  5. Teknik Analisis Data 30

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 32**

* 1. Gambaran Umum Kota Ternate 32

1. Sejarah Singkat pemerintah Kota Ternate 32
2. Kondisi Geografi Kota ternate 33
3. Kependudukan 34
4. Visi dan Misi Kota Ternate 34
5. Lokasi Penelitian 35
6. Gambaran Umum DPKAD Kota Ternate 35
7. Tugas Pokok dan Fungsi DPKAD Kota Ternate 36
8. Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan

DPKAD Kota Ternate 37

* 1. Deskripsi Data LRA APBD Kota Ternate 39
  2. Analisis Konsep Value For Money 43

1. Anlisis Rasio Ekonomis 43
2. Analisis Rasio Efektivitas 47
3. Analisis Rasio Efisiensi 51

**BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 56**

* 1. Kesimpulan 56
  2. Rekomendasi 57

DAFTAR PUSTAKA 58

LAMPIRAN

**DAFTAR TABEL**

halaman

TABEL 1.1 Struktur APBD Kota Ternate Tahun Anggaran 2010-2014 5

TABEL 2.1 Operasional Rasio Ekonomis, Efisiensi dan efektivitas 22

TABEL 2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu 23

TABEL 2.3 Operasional Rasio Ekonomis 25

TABEL 2.4 Operasional Rasio Efisiensi 26

TABEL 2.5 Operasional Rasio Efektifitas 27

TABEL 3.1 Operasional Rasio Ekonomis, Efisiensi dan efektivitas 31

TABEL 4.1 Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Daratan Kota Ternate 34

TABEL 4.2 Laporan Realisasi Anggaran APBD Kota Ternate TA. 2010-2014 39

TABEL 4.3 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan TA. 2010-2014 43

TABEL 4.4 Rasio Ekonomis Kinerja Keuangan Kota Ternate T.A 2010-2014 44

TABEL 4.5 Operasionalisasi Rasio Ekonomis 46

TABEL 4.6 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan (PAD) TA 2010-2014 48

TABEL 4.7 Rasio Efektivitas Kinerja Keuangan Kota Ternate T.A 2010-2014 49

TABEL 4.8 Operasionalisasi Rasio Efektivitas 50

TABEL 4.9 Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan

Biaya Pemungutan T.A 2010-2014 52

TABEL 4.10 Rasio Efisiensi Kinerja Keuangan Kota Ternate T.A 2010-2014 53

TABEL 4.11 Operasionalisasi Rasio Efisiensi 54

**DAFTAR GAMBAR**

halaman

GAMBAR 2.1 : Perencanaan Kinerja 17

GAMBAR 2.2 : *Input* – Program & Kegiatan – *Output & Outcome* 18

GAMBAR 2.2 : Kerangka Pemikiran Penelitian 23

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. LRA Pendapatan dan Belanja Pemkot Ternate Tahun 2010

Lampiran 2. LRA Pendapatan dan Belanja Pemkot Ternate Tahun 2011

Lampiran 3. LRA Pendapatan dan Belanja Pemkot Ternate Tahun 2012

Lampiran 4. LRA Pendapatan dan Belanja Pemkot Ternate Tahun 2013

Lampiran 5. LRA Pendapatan dan Belanja Pemkot Ternate Tahun 2014

Lampiran 6. Rincian Anggaran Belanja Langsung DISPENDA Kota Ternate Tahun 2014

Lampiran 7. Biaya Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2010

Lampiran 8. Biaya Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2011

Lampiran 9. Biaya Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2012

Lampiran 10. Biaya Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2013

Lampiran 11. Biaya Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2014

Lampiran 11. Hasil Wawancara

Lampiran 16. Lembar Konsultasi Pembimbing Tugas Akhir

Lampiran 17 Lembar Asistensi Revisi Tugas Akhir

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Pemberian otonomi dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Kabupaten/Kota akan membawa konsekuensi pada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, misi utama ditetapkannya kedua Undang-Undang tersebut adalah bukan hanya keinginan untuk melimpahkan kewenangan pembangunan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih penting adalah efisiensi dan efektivitas sumber daya keuangan. Untuk itu di perlukannya suatu laporan keuangan yang handal dan dapat di percaya agar dapat menggambarkan sumber daya keuangan daerah tersebut dengan analisis prestasi pengelolaan sumber daya keuangan daerah itu sendiri. Hal tersebut sesuai dengan ciri penting dari suatu daerah otonom yang mampu menyelenggarakan otonomi daerahnya yaitu terletak pada strategi sumber daya manusia (SDM) dan kemampuan di bidang keuangan daerah. Kedua UU tersebut juga memberi arti penting bagi proses reformasi lembaga sektor publik di Indonesia dan juga memberi dasar bagi serangkaian reformasi kelembagaan dalam rangka menciptakan *good governance*, yaitu pemerintah yang bersih, ekonomis, efektif, transparan, responsif, dan akuntabel.

Sejalan dengan pemberlakuan kedua Undang-Undang tersebut, lahirlah tiga paket perundang-undangan, yaitu UU No, 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang telah membuat perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengaturan keuangan, khususnya Perencanaan dan Anggaran Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, dari keseluruhan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah, maka Pemerintah mewujudkannya melalui Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolalaan Keuangan Daerah yang bertujuan agar memudahkan dalam pelaksanaannya dan tidak menimbulkan multi tafsir dalam penggunaannya.

Dalam pengelolaan keuangan, Pemerintah melakukan reformasi dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahaan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Dengan adanya perundang-undangan ini maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 108 tahun 2000 tentang Tata Pertanggungjawaban Kepala Daerah menyarankan agar setiap akhir tahun anggaran, Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang terdiri dari Laporan Perhitungan APBD, Norma perhitungan APBD, Laporan Arus Kas, dan Neraca daerah yang dilengkapi dengan penilaian kinerja.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka pada pasal 31 ayat 2 UU No. 17 Tahun 2003 juga mengamanatkan bahwa Laporan Realisasi Anggaran selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja juga menjelaskan prestasi kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Laporan realisasi anggaran merupakan jenis laporan keuangan daerah yang lebih dahulu dihasilkan sebelum kemudian disyaratkan untuk membuat laporan neraca dan arus kas.Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
2. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas pengguna anggaran.

Anggaran dalam pemerintah merupakan tulang punggung (*back-bone*) penyelenggaraan pemerintah. Usaha pemerintah daerah dalam menggali sumber dana yang berasal dari potensi daerah yang memiliki serta kemampuan mengelola dan memanfaatkan sumber dana yang ada tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Anggaran memiliki peran penting sebagai alat stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Adapun pengelolaan sumber daya yang optimal dapat dilihat dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya. Bastian (2006) mengatakan bahwa jumlah pendapatan aktual Indonesia jauh lebih kecil dibandingkan dengan potensinya. Hal ini menunjukan bahwa pemanfaatan sumber daya yang ada di daerah belum optimal. Ketidakoptimalan ini dapat disebabkan oleh kurang tepatnya perencanaan dan penganggaran didaerah, meskipun sudah diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.

Adapun pengukuran kinerja instansi pemerintah merupakan alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan (program) sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.Pengukuran kinerja merupakan suatu evaluasi terhadap instansi pemerintah mengenai kegiatan atau program yang telah dilaksanakan berdasarkan tolok ukur yang telah dibuat (standar minimum pelayanan publik) atau berdasarkan basis regular dan pelayanan publik dalam rangka meningkatkan akuntabilitas publik.

Salah satu bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Prosedur penilaian kinerja pemerintah juga telah diatur, sehingga tiap satuan kerja diwajibkan untuk melakukan akuntabilitas dalam bentuk laporan, atau biasa disebut dengan LAKIP yang didalamnya berisi perencanaan strategis dan tolak ukur keberhasilan dengan berbagai indikator yang telah ditetapkan untuk mencapai visi dan misi organisasi. Pencapaian kinerja secara umum dituangkan dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (LAKIP).

LAKIP adalah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun dalam LAKIP belum ada bentuk evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah. Sebagaimana dikatakan oleh Mardiasmo (2004) seharusnya evaluasi kinerja dilakukan untuk mengevaluasi hasil suatu program, aktivitas, dan fungsi serta efektivitas, terhadap pencapaian tujuan dan target. Serta pengukuran tingkat pencapaian kinerja di dalam LAKIP dilakukan hanya membandingkan antara target dan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.

Elsa Sari Yuliana yang meneliti penilaian kinerja keuangan pemerintah kota Pontianak, dimana hasil penelitian mengenai penilaian kinerja keuangan berdasarkan kriteria efektif menunjukkan “Sangat Efektif”, kriteria efisiensi “Tidak Efisien” dan kriteria ekonomis rata-rata kinerja keuangan Pemerintah Kota Pontianak bermakna “Cukup Ekonomis”, persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama maneliti mengenai kinerja keuangan dengan metode yang sama namun perbedaan dari penelitian ini adalah objek penelitian yang berbeda, serta kinerja keuangan yang diteliti dari penelitian terdahulu hanya ingin memperkuat kinerja keuangan sudah sesuai dengan opini BPK tentang pemerintah kota Pontianak Tahun 2009-2013 memiliki opini WTP (wajar tanpa pengecualian) dimana opini tersebut merupakan opini tertinggi kedua yang diberikan BPK atas audit laporan keuangan instansi pemerintah.

Pemerintah Kota Ternate merupakan salah satu dari 10 kota/kabupaten yang bernaung dibawah Propinsi Maluku Utara dan pemerintahannya telah berumur 16 tahun, kota ternate sendiri memiliki 7 kecamatan diantaranya Ternate Utara, Ternate Selatan, Ternate Tengah, Pulau Ternate, Hiri, Batang Dua, dan Pulau Moti.

Mengingat kajian meliputi APBD Tahun Anggaran 2010 sampai dengan tahun 2014, maka struktur anggaran ini akan mengambil anggaran berbasis kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai penyempurnaan anggaran Berbasis Kinerja. Berikut ini adalah gambaran perkembangan APBD untuk 5 (lima) tahun anggaran :

**Tabel 1.1**

**Struktur APBD Kota Ternate Tahun Anggaran 2010-2014**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Uraian** | **Anggaran (Rp)** | **Realisasi (Rp)** |
| 2010 | Pendapatan Asli Daerah | 26.905.000.000,00 | 21.442.993.424,00 |
|  | Pendapatan Transfer | 417.790.455.800,00 | 417.075.237.962,00 |
|  | Lain-lain Pendapatan yang Sah | 20.806.672.000,00 | 20.296.242.535,00 |
|  | **Jumlah Pendapatan 2010** | **465.502.127.800,00** | **458.814.473.921,00** |
|  | Belanja Operasi | 385.314.183.030,00 | 353.604.112.994,00 |
|  | Belanja Modal | 101.856.589.738,00 | 100.569.236.838,00 |
|  | Belanja Tidak Terduga | 1.000.000.000,00 | 669.664.800,00 |
|  | **Jumlah Belanja 2010** | **488.170.772.768,00** | **454.843.014.632,00** |
|  | **Surplus/ (Defisit)** | **(22.668.644.968,00)** | **3.971.459.289,00** |
|  | **Penerimaan Pembiayaan Daerah** | **22.668.644.968,00** | **2.871.609.770,00** |
|  | **Pengeluaran Pembiayaan Daerah** | **-** | **-** |
|  | **Pembiayaan Netto** | **22.668.644.968,00** | **2.871.609.770,00** |
|  | **SILPA** | **-** | **6.843.069.059,00** |
| 2011 | Pendapatan Asli Daerah | 32.200.000.000,00 | 31.318.111.818,00 |
|  | Pendapatan Transfer | 406.929.540.000,00 | 394.183.708.114,00 |
|  | Lain-lain Pendapatan yang Sah | 98.479.491.700,00 | 101.568.988.730,00 |
|  | **Jumlah Pendapatan 2011** | **537.609.031.700,00** | **527.070.808.662,00** |
|  | Belanja Tidak Langsung | 291.734.236.637,00 | 291.772.555.970,00 |
|  | Belanja Langsung | 272.402.602.305,00 | 240.203.027.673,00 |
|  | **Jumlah Belanja 2011** | **564.136.838.942,00** | **531.975.583.643,00** |
|  | **Surplus/ (Defisit)** | **(26.527.807.242,00)** | **(4.904.774.981,00)** |
|  | **Penerimaan Pembiayaan Daerah** | **28.624.807.142,00** | **6.862.190.786,00** |
|  | **Pengeluaran Pembiayaan Daerah** | **2.097.000.000,00** | **2.097.000.000,00** |
|  | **Pembiayaan Netto** | **26.527.807.142,00** | **4.765.190.786,00** |
|  | **SILPA** |  | **(139.584.195,00)** |
| 2012 | Pendapatan Asli Daerah | 38.435.000.000,00 | 32.909.001.048,00 |
|  | Pendapatan Transfer | 495.331.085.000,00 | 491.077.240.391,00 |
|  | Lain-lain Pendapatan yang Sah | 51.635.457.000,00 | 50.501.756.148,00 |
|  | **Jumlah Pendapatan 2012** | **585.401.542.000,00** | **574.487.997.587,00** |
|  | Belanja Tidak Langsung | 336.423.174.044,00 | 340.411.093.472,00 |
|  | Belanja Langsung | 271.269.120.701,00 | 243.312.551.848,00 |
|  | **Jumlah Belanja 2012** | **607.692.294.745,00** | **583.723.645.320,00** |
|  | **Surplus/ (Defisit)** | **(22.290.752.745,00)** | **(9.235.647.733,00)** |
|  | **Penerimaan Pembiayaan Daerah** | **(141.234.425,00)** | **(141.234.425,00)** |
|  | **Pengeluaran Pembiayaan Daerah** | **5.250.000.000,00** | **4.750.000.000,00** |
|  | **Pembiayaan Netto** | **(5.391.234.425,00)** | **(4.891.234.425,00)** |
|  | **SILPA** | **(27.681.987.170,00)** | **(14.126.882.158,00)** |
| 2013 | Pendapatan Asli Daerah | 43.535.000.000,00 | 40.572.363.457,00 |
|  | Pendapatan Transfer | 547.345.576.000,00 | 548.427.292.935,00 |
|  | Lain-lain Pendapatan yang Sah | 57.332.791.000,00 | 57.699.970.178,00 |
|  | **Jumlah Pendapatan 2013** | **648.213.367.000,00** | **646.699.626.570,00** |
|  | Belanja Tidak Langsung | 354.213.142.502,00 | 341.028.043.326,00 |
|  | Belanja Langsung | 326.029.711.373,00 | 303.483.287.987,00 |
|  | **Jumlah Belanja 2013** | **680.242.853.875,00** | **644.511.331.313,00** |
|  | **Surplus/ (Defisit)** | **(32.029.486.875,00)** | **2.188.295.257,00** |
|  | **Penerimaan Pembiayaan Daerah** | **37.779.486.875,00** | **(14.430.759.540,00)** |
|  | **Pengeluaran Pembiayaan Daerah** | **5.750.000.000,00** | **5.579.600.000,00** |
|  | **Pembiayaan Netto** | **32.029.486.875,00** | **(20.010.359.540,00)** |
|  | **SILPA** |  | **(17.822.064.283,00)** |
| 2014 | Pendapatan Asli Daerah | 54.493.884.000,00 | 57.488.803.335,94 |
|  | Pendapatan Transfer | 699.990.109.000,00 | 715.145.849.038,00 |
|  | Lain-lain Pendapatan yang Sah | 260.000.000,00 | 51.050.100,00 |
|  | **Jumlah Pendapatan 2014** | **754.743.993.000,00** | **772.685.702.473,94** |
|  | Belanja Operasi | 612.703.287.461,00 | 571.785.738.843,00 |
|  | Belanja Modal | 162.211.558.539,00 | 149.189.430.887,24 |
|  | Belanja Tak Terduga | 10.000.000.000,00 | 9.686.580.000,00 |
|  | **Jumlah Belanja 2014** | **784.914.846.000,00** | **730.661.749.730,24** |
|  | **Surplus/ (Defisit)** | **(30.170.853.000,00)** | **42.023.952.743,70** |
|  | **Penerimaan Pembiayaan Daerah** | **36.520.853.000,00** | **(17.822.064.283,00)** |
|  | **Pengeluaran Pembiayaan Daerah** | **6.350.000.000,00** | **5.750.000.000,00** |
|  | **Pembiayaan Netto** | **30.170.853.000,00** | **(23.572.064.283,00)** |
|  | **SILPA** |  | **18.451.888.460,70** |

Sumber data : data primer (data olahan)

Dari gambaran struktur APBD Kota Ternate selama 5 tahun anggaran, pada sisi pendapatan menunjukan bahwa Dana Perimbangan masih mendominasi penerimaan daerah dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini mengindikasikan masih tingginya ketergantungan fiskal Pemerintah Daerah Kota Ternate terhadap pemerintah Pusat selama kurun waktur 2010-2014 kendati paket otonomi daerah telah digulirkan. Pada sisi kebutuhan belanja daerah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini merupakan dampak dari kewenangan otonomi daerah dimana pemerintah daerah secara aktif dan lebih leluasa melakukan pembiayaan dalam upaya pengembangan segala bentuk aktifitas program-program pembangunan di daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini menjadi penelitian dengan “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Konsep *Value for money* di Pemerintah Kota Ternate”.

1. **Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengukuran kinerja keuangan menggunakan konsep *value for money* berdasarkan 3E : Ekonomis, Efektifitas dan efisiensi.
2. Dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah kota Ternate digunakan Laporan Realisasi APBD untuk 5 tahun anggaran yakni tahun 2010 hingga tahun 2014.
3. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Seberapa baik kinerja keuangan Pemerintah Kota Ternate bila dilihat dari konsep *value for money* tahun anggaran 2010-2014” ?

1. **Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur seberapa baik kinerja keuangan Pemerintah Kota Ternate dengan menggunakan konsep *value for money* tahun anggaran 2010-2014.

1. **Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang diharapkan dengan dilaksanakannya penelitian ini antara lain:

1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk meningkatkan kinerja keuangannya dengan menggunakan konsep *value for money*.

1. Bagi Akademisi

Sebagai bahan acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan diharapkan dapat menambah wawasan kepada akademisi mengenai analisis kinerja keuangan pemerintah daerah.

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman praktis bagi peneliti dalam menerapkan teori yang telah di dapat selama berada di bangku perkuliahan.

**BAB II**

**LANDASAN TEORI**

1. **Kinerja**
2. **Pengertian Kinerja**

Kamus besar bahasa Indonesia menjelaskan kinerja sebagai prestasi, tingkat capaian, realisasi, dan pemenuhan. Adapun terminologi tersebut mengacu pada dampak tujuan tindakan publik, tetapi beberapa berhubungan secara subjektif dengan tingkat kepuasan yang dirasakan sebagai suatu hasil dari suatu tindakan (Ritonga, 2010). Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga Pasal 1 Ayat 12, kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari kegiatan dalam satu program.

Indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu.Indikator kinerja juga berarti sebagian ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang mengambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan (BPKP, 2000).

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategi (*strategic planning*) suatu organisasi yang umum dapat dikatakan juga bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu (Bastian, 2001).

Untuk mengetahui keberhasilan/kegagalan suatu organisasi, seluruh aktivitas organisasi tersebut harus dapat diukur, dan pengukuran tersebut tidak semata-semata kepada *input*, tetapi lebih ditekankan kepada *output*, atau manfaat program tersebut. Aspek-aspek dalam pengukuran kinerja adalah (Bastian, 2001):

1. Aspek Finansial

Aspek finansial meliputi anggaran atau cash flow

1. Kepuasan Pelanggan

Peran dan posisi pelanggan sangat krusial dalam penentuan strategi perusahaan.Untuk itu manajemen perlu memperoleh informasi yang relevan tentang tingkat kepuasan pelanggan.

1. Operasi dan pasar internal

Informasi operasi dan pasar internal menentukan tingkat efisiensi dan efektitivitas operasi organisasi.

1. Kepuasan pegawai

Organisasi yang banyak melakukan inovasi, peran strategis pegawai sangat menentukan kelangsungan organisasi.

1. Kepuasan komonitas dan shareholders/stakeholders
2. Waktu

Informasi untuk pengukuran harus informasi terbaru, sehingga manfaat hasil pengukuran kinerja dapat dimaksimalkan.

Mekanisme pengukuran kinerja dapat dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Membuat komitmen dan menjalankan pengukuran kinerja. Hal yang perlu dilakukan oleh intansi adalah sesegera mungkin membuat komitmen pengukuran kinerja, dan menjalankannya dengan tidak mengharapkan pengukuran kinerja akan langsung sempurna, untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap pengukuran kinerja tersebut.
2. Perlakuan akuntansi kinerja sebagai suatu proses yang berkelanjutan (*ongoing proses*). Pengukuran kinerja merupakan suatu proses yang bersifat interaktif. Proses ini merupakan suatu cerminan upaya organisasi untuk memperbaiki kinerja.
3. Menyesuaikan proses pengukuran kinerja dengan organisasi. Organisasi harus menetapkan ukuran kinerja yang sesuai dengan bentuk dan besarnya organisasi, budaya, visi, tujuan, sasaran dan struktur organisasi.

Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi pemerintah dalam pemberian pelayanan publik, untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan, dan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Mardiasmo, 2005).

1. **Peran indikator Kinerja**

Menurut Bastian (2001). Indikator kinerja merupakan sesuai yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex-ante*), tahap peaksanaan (*on-going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex-post*). Secara umum, indikator kinerja memiliki beberapa fungsi atau peranan sebagai berikut:

1. Memperjelas tentang apa, berapa, dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan. Kegiatan pada umumnya berjangka waktu tidak lebih lama dari satu tahun. Kejelasan tentang yang akan dilakukan dalam aktifitas keseharian organisasi dalam pencapaian visi dan misi organisasi akan terwakili melalui pendefinisian indikator kinerja mengingat kinerja adalah ukuran tentang tingkat keberhasilan yang harus dicapai oleh suatu organisasi adalah ukuran tahun per tahun.
2. Menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk menghindari kesalahan interprestasi selama pelaksanaan kebijaksanaan/program/kegiatan dan dalam menilai kinerjannya termaksud kinerja instansi pemerintah yang melaksanakannya. Karena indikator kinerja memberikan rambu-rambu bagi organisasi untuk melaksanakan kegiatannya, maka setiap pihak mendapatkan kesepahaman tentang tahapan dan kriteria yang dibangun dalam menajalankan aktivitasnya.
3. Membangun dasar bagi pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja organisasi/unit kerja. Indikator akan menjadi patokan bagi organisasi dalam menjalankan tugasnya.

Yunita dan hendra (2010) mengatakan penentuan kinerja harus memenuhi kriteri-kriteria sebagai berikut :

1. Spesifikasi, berarti unik menggambarkan suatu obyek/subyek tertentu, tidak berdwimakna atau diinterprestasikan lain.
2. Dapat diukur yaitu secara obyektif dapat diukur baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
3. Relevan, yaitu indikator kinerja sebagai alat ukur harus terkait dengan apa yang diukur dan menggambarkan keadaan subyek yang diukur, bermanfaat bagi pengambilan keputusan
4. Tidak bias, artinya tidak memberikan kesan atau arti yang menyesatkan.
5. **Manfaat indikator kinerja**

Manfaat dari tuntutan skema indikator kinerja sebagai berikut :

1. Memberikan kejelasan tujuan organisasi
2. Mengembangkan persetujuan pengukuran aktivitas
3. Keuntungan pengertian lebih tinggi atas proses produksi
4. Fasilitas perbandingan kinerja dari organisasi yang berbeda
5. Memberi fasilitas setting of target untuk organisasi dan manager, mempertimbangkan pertanggunggjawaban organisasi ke pemilik.

Pengukuran hanya merupakan langkah awal proses perbandingan. Fenomena yang diukur seharusnya dibuat menjadi model proses produksi. Langkah pemodelan sering mengalami kesulitan, sebab pengertian dimana input sektor publik dirubah menjadi *output* sangat tidak baik, terutama ketika lingkungan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hasil.

Smith (1990) memberikan 5 (lima) alasan kenapa variasi dalam pengukuran kinerja bisa diamati didalam organisasi:

1. Organisasi bisa mengikuti tujuan yang berbeda
2. Organisasi bisa mempunyai lingkungan yang berbeda
3. Organisasi bisa menghadapi sumber biaya yang berbeda
4. Organisasi bisa melaporkan kinerjanya berbeda
5. Organisasi bisa mempunyai level efisiensi yang berbeda.

Maksud dari pemodelan ini adalah untuk menguraikan masalah yang bermacam-macam.Langkah pemodelan sangat krusial.Analisis kinerja harus mempertimbangkan pengaruh lingkungan eksternal.

1. **Penilaian Kinerja**

Penilaian kinerja pemerintah adalah hal yang sangat penting dilakukan dan sebaiknya dilakukan secara terus-menerus. Hal ini selaras dengan pernyataan Better Local Government (1996) dan McGeough and Horan (1999) dalam Boyle, bahwa penilaian kinerja melalui audit *value for money* yang dilakukan kepada pemerintah daerah akan memberikan status legal yang memiliki keterbandingan dan sebaiknya dilakukan secara lebih komprehensif dan lebih mendalam oleh pemerintah daerah itu sendiri.

Mengenai proses pelaksanaan penilaian kinerja yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah daerah, ada berbagai indikator yang dapat dipilih untuk dipenuhi. Ritonga (2010) mengatakan bahwa indikator kinerja hendaknya terdiri dari karakter sebagai berikut:

1. Spesifik dan jelas
2. Dapat diukur saran objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif
3. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menujukan pencapaian keluaran dan hasil
4. Harus cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan
5. Efektif dan ekonomis.

Berdasarkan keterangan Elsa dalam Zainuddin (2013), indikator-indikator yang menggambarkan kinerja pelaksanaan anggaran adalah:

1. Belanja pemerintah telah memenuhi tujuannya
2. Dieksekusi dengan baik untuk memenuhi targetnya
3. Efisien dalam pelaksanaannya
4. Efektif mencapai tujuannya
5. Berbagai indikator lain yang mewakili kinerja dan kualitas.

Untuk mengukur kinerja suatu kegiatan, program, dan SKPD dapat digunakan ukuran penilaian kinerja pemerintah daerah yang didasarkan pada 5 (lima) indikator sebagai berikut (Yunita dan Hendra (2010) :

1. Masukan (*input*), adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Tolok ukur kinerja ini adalah berdasarkan tingkat atau besaran sumber-sumber : dana, sumber daya manusia, material, waktu, teknologi, dan sebagainya yang digunakan untuk melaksanakan program dan atau kegiatan.
2. Proses (*process*), adalah ukuran kegiaatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
3. Keluaran (*output*) adalah sesuatu kegiatan yang diharapkan langsung dapat dicapai dari satu kegiatan yang dapat berwujud (*tangible*) maupun tidak tewujud (*intangible*). Tolok ukur kinerja ini berdasarkan produk (barang atau jasa) yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan masukan yang digunakan.
4. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung. Tolok ukur kinerja ini berdasarkan tingka keberhasilan yang dapat dicapai berdasarkan keluaran program atau kegiatan yang sudah dilaksanakan.
5. Manfaat (*benefit*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Tolok ukur kinerja ini berdasarkan tingkat kemanfaatan yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat dan pemerintah daerah dari hasil.
6. Dampak (*impact*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Tolok ukur kinerja ini berdasarkan dampaknya terhadap kondisi makro yang ingin dicapai dari manfaat.
7. **Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja**

Menurut Bastian (2001:330) prestasi pelaksanaan program dapat diukur akan mendorong pencapaian prestasi tersebut. pengukuran prestasi yang dilakukan secara berkelanjutan memberikan umpan balik untuk upaya perbaikan secara terus menerus dan pencapaian tujuan di masa mendatang.

Peranan pengukuran prestasi sebagai alat manajemen untuk:

1. Memastikan pemahaman para pelaksana dan ukuran yang digunakan untuk pencapaian prestasi
2. Memastikan tercapainya skema prestasi yang disepakati.
3. Memonitor dan mengevaluasi kinerja dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaan
4. Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas prestasi pelaksanaan yang telah diukur sesuai dengan system pengukuran prestasi yang telah disepakati.
5. Menjadikan alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki prestasi organisasi.
6. Mengindentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.
9. Menunjukan peningkatan yang perlu dilakukan.
10. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi.

Dari berbagai cara mengukur kinerja yang telah dijabarkan diatas secara singkat dapat disimpulkan bahwa hal penting yang perlu dinilai dalam kinerja keuangan adalah ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Ketiga hal ini secara bersamaan dapat disebut dengan *value for money*.

1. **Konsep Value For Money**

Manajemen kinerja terintegrasi (*integrated performance management*) terdiri atas dua bagian utama, yaitu perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja. (Mahmudi, 2006)

1. Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja adalah aktifitas analisis dan pengambilan keputusan kedepan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa mendatang. Pada prinsipnya perencanaan kinerja merupakan penetapan tingkat pencapaian kinerja yang dinyatakan dengan ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan. Perencanaan merupakan komponen kunci untuk lebih mengefektifkan dan mengefisiensikan pemerintah daerah.Sedangkan perencanaan kinerja membantuk pemerintah untuk mencapai tujuan yang sudah didefinisikan dalam rencana stratejik, termaksud di dalamnya pembuatan target kinerja dengan menggunakan ukuran-ukuran kinerja.

Perencanaan kinerja terdiri dari empat tahap :

1. Penentuan misi, visi, tujuan, dan strategi
2. Penerjemaah misi, visi, tujuan dan strategi ke dalam sasaran strategik, inisiatif startegik, indikator kinerja (*input, output, outcome, benefit, impact*)
3. Penyusunan program
4. Penyusunan anggaran

**Gambar 2.1**

**Perencanaan Kinerja**

**PERENCANAAN KINERJA**

VISI

MISI

TUJUAN

KEBIJAKAN

PROGRAM

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

Sumber data :*Anggaran Berbasis Kinerja* (Yunita dan Hendra,2010)

1. Pengukuran Kinerja

Menurut Yunita dan Hendra (2010) pengukuran kinerja *Value For Money* dibangun atas tiga komponen utama, yaitu :

1. Komponen misi, visi, sasaran dan target
2. Komponen *input*, proses, *output* dan *outcome*
3. Komponen pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas

Sebelum dilakukan pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, tahap pertama yang harus dilakukan adalah menentukan misi, visi, tujuan, sasaran, dan target kinerja.Komponen ini menjadi tujuan tertinggi yang hendak dicapai dari satu sistem maanajemen kinerja.Setiap indikator kinerja harus dikaitkan dengan pencapaian misi, visi, tujuan, sasaran, dan target.

Penentuan misi, visi, tujuan, sasaran, dan target dapat didahului dengan kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pelayanan adalah sebuah fungsi kebutuhan, bukan fungsi ketersediaan dana, maka penjaringan aspirasi masyarakat dilakukan untuk mengetahui kebutuhan publik. Tingkat kebutuhan publik akan berimplikasi pada tingkat dan jenis pelayanan yang perlu diberikan. Penjaringan aspirasi masyarakat berfungsi untuk mengetahui kecenderungan kebutuhan publik dan kecenderungan pasar (*trendwatching*), sehingga berdasarkan informasi tersebut organisasi dapat melakukan *envisioning*, yaitu menentukan visi dan misi organisasi.

Salah satu prinsip utama yang mesti terkandung dalam penganggaran adalah penekanan pada konsep *value for money* dan pengawasan atas kinerja *output* yang diukur dengan beberapa indikator. Tiga elemen dalam konsep *value for money*meliputi : (a) Ekonomis, (b) Efisien, dan (c) Efektif. (Mardiasmo (2002).

Pengukuran kinerja merupakan bagian dari fungsi pengendalian manajemen, karena pengukuran kinerja dapat digunakan untuk melakukan pengendalian aktifitas.Setiap aktifitas harus dapat diketahui tingkat efisiensi dan efektivitasnya.Efisiensi dan efektifitas menjadi dasar untuk melakukan penilaian kinerja. Dalam organisasi sektor publik, pengukuran kinerja terutama dilakukan untuk mengukur 3E tersebut yakni ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (Yunita dan Hendra:2010).

**Gambar 2.2**

***Input* – Program & Kegiatan – *Output*& Outcome**

Sumber data :*Anggaran Berbasis Kinerja* (Yunita dan Hendra,2010).

***Input*:**

**Pendanaan**

***Output***

***Outcome***

***Outcome***

***Outcome***

**“Efektivitas”**

**“Efisiensi”**

Pengukuran kinerja *value for money* merupakan bentuk pengukuran kinerja yang spesifik dan unik pada organisasi sektor publik.Konsep *value for money* memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai uang, yang artinya bahwa setiap rupiah harus dihargai secara layak dan digunakan sebaik-baiknya.

1. Ekonomis

Ekonomis dapat diartikan sebagai pemerolehan *input* dengan kuantitas dan kualitas tertentu pada harga terendah atau dalam praktik berarti “meminimalkan penggunaan sumber daya dalam melaksanakan suatu kegiatan”. Konsep ekonomis sangat berkaitan dengan konsep biaya untuk memperoleh unit *input*. *Input* (masukan) merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. *Input* dapat berupa anggaran/dana, sumber daya manusia, peralatan/teknologi, material yang digunalan untuk melaksanakan suatu kegiatan (Yunita dan Hendra, 2010).

Ekonomis memiliki pengertian bahwa sumber daya *input* hendaknya diperoleh dengan harga yang lebih rendah (*spending less*) (Mahmudi, 2006). Organisasi harus dapat memastikan bahwa dalam pemerolehan sumber daya *input* , seperti material, barang, dan bahan baku tidak terjadi pemborosan. Berikut ini formula untuk mengukur aspek ekonomis :

Formula :

Menurut Mardiasmo (2009), pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan. Ekonomi merupakan ukuran relatif. Pertanyaan sehubungan dengan pengukuran ekonomi adalah :

1. Apakah biaya organisasi lebih besar dari yang telah dianggarkan oleh organisasi?
2. Apakah biaya organisasi lebih besar daripada biaya organisasi lain yang sejenis yang dapat diperbandingkan ?
3. Apakah organisasi telah menggunakan sumber daya finansialnya secara optimal ?
4. Efisien

Efisien dapat dimaknai pemanfaatan *input* minimal untuk mencapai hasil yang maksimal atau dalam praktik berarti “melaksanakan sesuatu dengan benar”. Jika ekonomis lebih terfokus pada bagaimana memperoleh biaya atau harga lebih rendah, maka efisiensi lebih terkait dengan hubungan antara *input*  dan *output* yakni hubungan antara *output* berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya (*input*) yang digunakan untuk menghasilkan *output* tersebut. Suatu program (kegiatan) dikatakan efisien jika program atau kegiatan tersebut mampu menghasilkan *output* tertentu dengan *input* serendah-rendahnya atau dengan *input* tertentu mampu menghasilkan *output* yang sebesar-besarnya (*spending well*) (Mahmudi, 2006).

Formula :

Sebagaimana dikatakan Halim (2002) bahwa efisiensi dalam rasio efisiensi berarti melihat perbandingan antara besaran biaya yang dikeluarkan untuk memungut pendapatan, dengan realisasi pendapatan yang diterima.kinerja pemerintah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah semakin baik.Untuk itu pemerintah daerah harus semakin cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya efisien ataukah tidak. Menurut halim rasio yang dilakukan dalam mengukur efisiensi suatu kinerja keuangan dilakukan dengan menggunakan rumus dibawah ini :

Menurut elsa (2015) untuk mengukur efisien adalah Apakah *input* (orang, uang dan peralatan) secara bersama-sama menghasilkan *output* (barang dan jasa) secara optimal?

1. Efektivitas

Kata efektifitas kerap diartikan mencapai tujuan dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan secara maksimal atau dalam praktek berarti “melakukan hal yang benar”.Dengan demikian efektivitas berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai (Yunita dan Hendra, 2010).

Efekivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output*  terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input,* efisiensi pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu program atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan, atau dikatakan *spending wisely.* (Mahmudi, 2006).

Formula :

Menurut Mahmudi dalam buku “Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” (2010:142). Efektifitas untuk analisa kinerja keuangan dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan). Sedangkan menurut Elsa (2015) untuk mengukur kinerja efektifitas adalah dengan melihat Apakah tujuan program dapat dicapai tanpa menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan?

Hal ini senada dengan Mihaiu et al (2010) yang menyatakan bahwa efektivitas adalah suatu indikator yang dihasilkandari rasio yang harusdi capai oleh suatu program, sedangkan efisiensi disiratkan dari hubungan antara dampak ekonomi yang dihasilkan dari pelaksanaan suatu program dan upaya yang dilakukan untuk membiayai program tersebut.

Pemerintah Daerah dalam melakukan penilaian kinerja keuangan untuk menilai rasio efektivitas, ekonomis maupun efisiensi maka perlu dilakukan operasionalisasi terhadap rasio-rasio tersebut yang dapt dilihat dibawah ini :

**Tabel 2.1**

**Operasionalisasi Rasio Ekonomis, Rasio Efisiensi**

**dan Rasio Efektivitas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rasio** | **Kriteria** | | |
| **Ekonomis** | **Efisiensi** | **Efektivitas** |
| ≥100% | Sangat ekonomis | Tidak efisien | Sangat efektif |
| 90,01% - 100% | Ekonomis | Kurang efisien | Efektif |
| 80,01% - 90,00% | Cukup ekonomis | Cukup efisien | Cukup efektif |
| 60,01% - 80,00% | Kurang ekonomis | Efisien | Kurang efektif |
| ≤ 60,00% | Tidak ekonomis | Sangat efisien | Tidak efektif |

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 Tahun 1996

Berdasarkan data di atas maka operasionalisasi rasio memiliki beberapa kriteria diantaranya kurang dari 60% maka “Tidak Ekonomis” apabila dilihat dari kriteria ekonomis,“Sangat Efisien” apabila dilihat dari kriteria efisien, dan “Tidak Efektif” apabila dilihat dari efektivitas. Sedangkan lebih dari 100% maka operasionalisasi rasionya memiliki kriteria “Sangat Ekonomis” apabila dilihat dari kriteria ekonomis, “Tidak Efisien” apabila dilihat dari kriteria efisien, dan “Sangat Efektif” apabila dilihat dari rasio efektifitas. Maka operasionalisasi tersebut merupakan pengukuran atas kinerja pemerintah terhadap rasio ekonomis, efisiensi maupun efektivitas.

Berdasarkan teori-teori yang telah dijelaskan sebelumnya diatas maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 2.3**

**Kerangka Pemikiran Penelitian**

Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kota Ternate Tahun Anggaran 2010- 2014

**Rumusan Masalah :**

“Seberapa baik kinerja keuangan Pemerintah Kota Ternate bila dilihat dari konsep *value for money* pada tahun anggaran 2010-2014” ?

**Alat Analisis:**

1. Analisis Rasio Ekonomis
2. Analisis Rasio Efektivitas
3. Analisis Rasio Efisien

**Hasil Analisis :**

Diharapkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Ternate baik dengan menggunakan konsep *value for money* terhadap Laporan Realisasi Anggaran APBD Tahun anggaran 2010-2014.

Adapun Penelitian terdahulu tentang analisis kinerja keuangan pemerintah dapat dilihat dibawah ini :

**Tabel 2.2**

**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Peneliti/Tahun** | **Judul** | **Metode Analisis** | **Hasil Penelitian** | **Perbedaan** | **Persamaan** |
| 1 | Elsa Sari Yuliana, Tashadi Tarmizi, Bob Mustafa /2015. | Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Pontianak | Metode penelitian ini adalah riset eksploratori dengan teknik analisa deskriptif dengan melihat trend kinerja keuangan Pemerintah Kota Pontianak selama 5 tahun. | Penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata kinerja keuangan Pemerintah Kota Pontianak memenuhi kriteria “Sangat Efektif” dari sisi efektivitasnya, kriteria “Tidak Efisien” bila dilihat dari efisiensinya, dan “Cukup Ekonomis” bila diamat dari sisi ekonominya. | Penelitian ini hanya menggunakan opini BPK untuk pemerintah Kota Ternate Tahun 2014 dengan opini WTP sebagai masalah dalam mengukur kinerja keuangan kota Pontianak | Metode yang digunakan sama serta analisis rasio yang digunakan masih tetap sama dengan penggunaan 3 Rasio berdasarkan 3E : ekonomis, efektifitas dan efisiensi |
| 2. | Tri Siwi Nugrahani, 2007 | Analisis Penerapan Konsep *Value For Money* Pada Pemerintah Daerah Istimewah Yogyakarta | Metode analisis Kualitatif dan kuantitatif. Setelah data terkumpul, selanjutnya data yang bersifat kuantitatif yang berwujud angka-angka hasil perhitungan atau pengukuran dapat diproses dengan beberapa cara yaitu : diklasifikasikan dan dianalisis. | Berdasar kan pengujian analisa perkembangan kinerja selama 4 tahun menunjukkan kinerja Pemda DIY tidak sepenuhnya mengalami  peningkatan. Hanya pada kinerja efektivitas yang mengalami peningkatan dari tahun 2002 hingga 2004. Perkembangan  ekonomi dan efisien tidak sepenuhnya meningkat. | Riset penelitian yang digunakan berbeda, serta pengujian analisa hanya menggunakan 4 tahun anggaran. | Sama-sama menggunakan 3 rasio konsep value for money berdasarkan 3E yakni ekonomis, efektifitas dan efisiensi. |
| 3. | Mentari Yosephen Sijabat, Choirul Saleh, Abdul Wachid. 2013 | Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. | Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif | Hasil penelitian menunjukkan kinerja keuangan kota malang dari tahun 2008 hingga 2012 mengalami kecendrungan  peningkatan yang positif dengan rata-rata tingkat kemandirian keuangan 16,43%, efektifitas PAD  107,7%, prioritas alokasi belanja masih pada belanja rutin, pertumbuhan rasio PAD, Pendapatan  dan belanja mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dan SILPA setiap tahun semakin meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan serta kinerja keuangan kota malang masih belum optimal sehingga perlu melakukan pembenahan lebih dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Malang. | Menggunakan metode pendekatan yang berbeda serta teknis analisis data yang berbeda dengan mengukur tingkat kemandirian keuangan, rasio efektifitas PAD, prioritas alokasi belanja, pertumbuhan rasio PAD. | Analisis kinerja keuangan dengan mengukur rasio efektifitas PAD |

Sumber data : Ringkasan penelitian terdahulu.

1. **Definisi Konseptional**

*Value For Money* (VFM) merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasar pada 3 elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. (Mardiasmo, 2009):

1. Ekonomi berkaitan dengan pemerolehan input dengan kualitas tertentu dengan harga terendah. Pengukuran ekonomi melalui rasio antara masukan aktual dengan yang direncanakan ( Lapsey dalam Ulum dan Murtin, 2004 ). Kinerja pemerintah daerah akandikatakan ekonomis bila rasionya diatas 100%, atau jumlah realisasi penerimaan melebihi jumlah anggaran yang ditetapkan.

Berdasarkan Perhitungan rasio ekonomis diatas maka dalam mengukur rasio tersebut maka operasionalisasi rasio dapat dilihat dibawah ini:

**Tabel 2.3**

**Operasionalisasi Rasio Ekonomis**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rasio** | **Kriteria Ekonomis** |
| ≥100% | Sangat ekonomis |
| 90,01% - 100% | Ekonomis |
| 80,01% - 90,00% | Cukup ekonomis |
| 60,01% - 80,00% | Kurang ekonomis |
| ≤ 60,00% | Tidak ekonomis |

Sumberdata : Keputusan Menteri Dalam Negeri No.

690.900.327 Tahun 1996

1. Efisien dapat dimaknai pemanfaatan *input* minimal untuk mencapai hasil yang maksimal atau dalam praktik berarti “melaksanakan sesuatu dengan benar”. Menurut Halim (2002) bahwa efisiensi dalam rasio efisiensi berarti melihat perbandingan antara besaran biaya yang dikeluarkan untuk memungut pendapatan, dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Berdasarkan Perhitungan rasio efisiensi diatas maka dalam mengukur rasio tersebut maka operasionalisasi rasio dapat dilihat dibawah ini:

**Tabel 2.4**

**Operasionalisasi Rasio Efisiensi**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rasio** | **Kriteria Efisiensi** |
| ≥100% | Tidak efisien |
| 90,01% - 100% | Kurang efisien |
| 80,01% - 90,00% | Cukup efisien |
| 60,01% - 80,00% | Efisien |
| ≤ 60,00% | Sangat efisien |

Sumber data : Keputusan Menteri Dalam Negeri No.

690.900.327 Tahun 1996

1. Efektif adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Dikatakan efektif jika rasio yang dicapai sama dengan 1 atau 100%, namun demikian semakin tinggi rasio efektivitas maka semakin baik. (Nugrahani, 2007).

Berdasarkan Perhitungan rasio efektivitas diatas maka dalam mengukur rasio tersebut maka operasionalisasi rasio dapat dilihat dibawah ini:

**Tabel 2.5 : Operasionalisasi Rasio Efisiensi**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rasio** | **Kriteria Efisiensi** |
| ≥100% | Sangat efektif |
| 90,01% - 100% | Efektif |
| 80,01% - 90,00% | Cukup efektif |
| 60,01% - 80,00% | Kurang efektif |
| ≤ 60,00% | Tidak efektif |

Sumberdata : Keputusan Menteri Dalam Negeri No.

690.900.327 Tahun 1996

1. **Fokus Penelitian**

Fokus dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan Pemerintah Kota Ternate untuk tahun anggaran 2010-2014 dengan konsep *value for money*, serta menggunakan berbagai analisis diantaranya :

1. Analisis Rasio Ekonomis
2. Analisis Rasio Efektivitas
3. Analisis Rasio Efisien
4. **Data yang Diperlukan**

Dalam melakukan analisa kinerja keuangan berdasarkan konsep *value for money* atas rasio 3E : ekonomis, efisien dan efektifitas maka data-data yang diperlukan adalah Laporan Realisasi Anggaran APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kota Ternate Tahun Anggaran 2010 sampai tahun 2014 untuk data keseluruhan pendapatan, baik pendapatan asli daerah berupa pendapatan pajak daerah maupun pendapatan retribusi daerah, serta biaya pemungutan pajak daerah kota Ternate.

**BAB III**

**METODOLOGI PENELITIAN**

1. **Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah riset eksploratori dengan teknik analisa deskriptif. Menurut Kotler, dalam buku *Principles of Marketing* (2006:122) riset eksploratori adalah penelitian yang bertujuan menghimpun informasi awal yang akan membantu upaya menetapkan masalah dan penelitian ini bersifat mendasar dan bertujuan untuk memperoleh keterangan, informasi data mengenai hal-hal yang belum diketahui. Data dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang merupakan penelitian yang menggunakan data yang dapat dihitung untuk mendapatkan penafsiran kuantitatif yang kuat dan dapat dinyatakan dalam bentuk angka-angka (Pasolong, 2012:70).

1. **Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kotaTernate, Jl. Yosudarso No, 14 Telp 0921-3211118. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate merupakan salah satu Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Ternate yang menangani urusan Pemerintahan umum bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, menjalankan fungsi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang betugas sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang menyusun anggaran, melaksanakan dan mempertanggunjawabkan Penggunaan Anggaran/barang, sekaligus sebagai Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) yang bertugas melaksanakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ternate dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Waktu penelitian berlangsung selama 3 (tiga) bulan.

1. **Sumber Data**

Sumber data untuk mendukung penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder, berikut penjelasan mengenai kedua sumber data tersebut, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiono, 2013:193). Data primer dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD Kota Ternate untuk Tahun Anggaran 2010- 2014, data ini penulis dapatkan dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Ternate.

1. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiono, 2013:193). Data sekunder penelitian ini berasal dari buku, jurnal-jurnal, tesis, skripsi, sertadari internet yang berkaitan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah kota Ternate.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan.Teknik ini ingin mengetahui seberapa jauh kesesuaian antar teori yang digunakan dengan keadaan yang seberapa besar diteliti. Dalam studi lapangan ini menggunakan tiga cara yaitu wawancara langsung, observasi, dan studi kepustakaan, Sugiono (2013:193).

1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (sugiono 2011:231). Dalam teknik wawancara ini peneliti melakukan proses wawancara terhadap kepala bagian instansi terkait maupun staf yang berhubungan dalam penyusunan penelitian ini.

1. Observasi

Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan phsikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Observasi dalam penelitian ini adalah peneliti mengamati kinerja keuangan pemerintah kota ternate dalam hal ini dilakukan di DPKAD Kota Ternate dan DISPENDA Kota Ternate serta Instansi Pemerintah yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. Penelitian kepustakaan

Penelitian ini merupakan penelitian sebagai usaha untuk memperoleh keterangan dan data dengan membaca dan mempelajari bahan-bahan teoritis dari buku-buku literatur, catatan kuliah serrta sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, agar diperoleh suatu pemahaman yang mendalam serta menunjang proses pembahasan mengenai masalah-masalah yang diidentifikasi (windiastuti, 2013). Penelitian kepustakan peneliti lebih memfokuskan terhadap literatur-literatur yang berbuhan dengan kinerja keuangan dengan konsep *value for money.*

1. **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yang didasarkan pada penggambaran yang mendukung analisa tersebut.Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD tahun 2010-2014 yang diperoleh dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate.

Menurut Halim (2001:127) analisis kinerja keuangan diukur melalui perhitungan rasio-rasio keuangan yang merupakan alat ukur kinerja keuangan. Rumus yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah kota dengan konsep *value for money* yaitu dilihat dari sisi 3E: Rasio ekonomis, Rasio efisiensi, dan Rasio efektivitas. Definisi operasional rasio ekonomis untuk analisis kinerja keuangan dihitung dengan menggunakan rumus :

|  |
| --- |
| **Realisasi Pendapatan**  **Anggaran Pendapatan** |

Rasio efektivitas untuk menilai kinerja keuangan dinilai dengan menggunakan:

|  |
| --- |
| **Realisasi Penerimaan PAD**  **Target Penerimaan PAD Berdasarkan Potensi Riil** |

Rasio efisiensi untuk analisis kinerja keuangan menggunakan persamaan berikut:

|  |
| --- |
| **Biaya yang Dikeluarkan untuk Memungut PAD**  **Realisasi Penerimaan PAD** |

Adapun operasionalisasi rasio-rasio tersebut dikelompokkan sebagaimana tertulis pada tabel 3.1 berikut ini:

**Tabel 3.1**

**Operasionalisasi Rasio Ekonomis, Rasio Efisiensi dan**

**Rasio Efektivitas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rasio** | **Kriteria** | | |
| **Ekonomis** | **Efisiensi** | **Efektivitas** |
| ≥100% | Sangat ekonomis | Tidak efisien | Sangat efektif |
| 90,01% - 100% | Ekonomis | Kurang efisien | Efektif |
| 80,01% - 90,00% | Cukup ekonomis | Cukup efisien | Cukup efektif |
| 60,01% - 80,00% | Kurang ekonomis | Efisien | Kurang efektif |
| ≤ 60,00% | Tidak ekonomis | Sangat efisien | Tidak efektif |

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 Tahun 1996